



# LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Pramuka No. 07 Pasir Panjang Pangkalan Bun

Telp. ( 0532 ) 21421, Fax ( 0532 ) 24935 Email : [disdikbudkobar@gmail.com](mailto:disdikbudkobar@gmail.com)

Web : [Dikbud.kotawaringinbaratkab.go.id](http://Dikbud.kotawaringinbaratkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk Akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Kotawaringin Barat menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam tahun 2022 yang meliputi kinerja atas tiga pilar utama kebijakan nasional di bidang pendidikan yaitu: (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan (2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas serta Pencitraan Publik. Selain itu, pelaksanaan dan pengembangan nilai seni dan budaya.

Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahun secara bertahap terus diupayakan ditingkatkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara bertahap dan telah dilaksanakan berbagai program pembangunan pendidikan nasional guna merealisasikan target-target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*).

Dengan adanya indikator kinerja kunci untuk setiap program dan kegiatan, maka evaluasi kinerja menjadi lebih terarah, terukur dan akuntabel.

Dalam upaya untuk percepatan pencapaian berbagai target pembangunan pendidikan nasional sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menempuh berbagai langkah terobosan berdasarkan amanat Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen, dan terbukti cukup efektif dalam mendorong kinerja seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Di pihak lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras di tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan pada saatnya akan dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan tahun 2022, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan nasional pada tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pangkalan Bun, Pebruari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kotawaringin Barat,



**Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si**  
NIP. 19630219 199303 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Peringkat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13.57	12.75	93.96	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Lama Sekolah	9.2	8.54	92.83	
2	Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase cagar budaya yang lestari	100	100	100	SangatTinggi

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 95,60 % dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan.

Walaupun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2022 ini, antara lain: Belum padunya perencanaan dengan implementasi anggaran pada saat pelaksanaan tahun anggaran, masih adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi/dinas/badan lain dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berimbas kepada lemahnya koordinasi dan fokus pada kegiatan, Terbatasnya anggaran yang diberikan menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Adapun langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan seperti diatas antara lain adalah : Merencanakan dengan lebih matang pada proses perencanaan dan memaksimalkan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, berkoordinasi dengan instansi/dinas/badan terkait dalam rangka memfokuskan kegiatan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Data Umum.....	2
1.3 Aspek Strategis.....	10
1.4 Permasalahan Utama.....	12
1.5 Landasan Hukum.....	13
1.6 Sistematika Penyajian .....	13
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	15
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	19
2.3 Rencana Kinerja Tahunan .....	19
2.4 Perjanjian Kinerja .....	21
BAB III.....	31
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	31
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	33
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional .....	58
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	58
3.5 Realisasi Keuangan.....	60
BAB IV.....	63
PENUTUP.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	2
Tabel: 1.2 Peta Penyetaraan Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	4
Tabel: 1.3 Data Pegawai Per 31 Desember 2022 .....	6
Tabel: 1.4 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022 .....	6
Tabel: 1.5 Data Aset Tahun 2022 .....	9
Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	16
Tabel: 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	17
Tabel: 2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	17
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022 .....	17
Tabel: 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	20
Tabel: 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 .....	22
Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	23
Tabel: 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022 .....	29
Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah .....	31
Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	32
Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 .....	50
Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	51
Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	54
Tabel: 3.6 Efisiensi Anggaran 2022 .....	58
Tabel: 3.7 Kegiatan Lintas Sektoral .....	60
Tabel: 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	60
Tabel: 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 .....	61





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.2 Data Umum

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kewenangan Pemerinrah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat . Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jabatan Struktural Sebelumnya	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 1) Subbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan 2) Subbag Perencanaan dan Penyelenggara Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah 3) Subbag Keuangan & Barang Milik Daerah 3. Kepala Bidang	1. Dibawah Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 1) Pengelola Kepegawaian 2. Dibawah Subbag Perencanaan dan Penyelenggara Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2) Pengelola Bahan	

Jabatan Struktural Sebelumnya	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
Pembinaan PAUD dan PNF 1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 3) Kepala Seksi Pendidikan Non Formal 4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD 2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD 3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SD 5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP 2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP 3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 6. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 1) Kepala Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama 2) Kepala Seksi PTK Sekolah Dasar 3) Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal 7. Kepala Bidang Kebudayaan 1. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman 2. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	Perencanaan 3) Pengelola Data 3. Dibawah Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah 1) Bendahara 2) Verifikator Keuangan 3) Pengelola Barang Milik Daerah 4) Pengadministrasi Umum 4. Dibawah Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 1) Pengelola Data (Peserta Didik PAUD) 2) Analis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal 5. Dibawah Kepala Seksi Pendidikan Non Formal 1) Pengelola Kelembagaan Pendidikan 6. Dibawah Seksi Kurikulum dan Penilaian SD 1) Pengelola Kurikulum SD 7. Dibawah Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD 1) Pengelola Peserta Didik 2) Pengelola Data (Peserta Didik SD ) 8. Dibawah Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9. Dibawah Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP 1) Pengelola Data 2) Pengelola Kurikulum 3) Pengelola Kelembagaan Pendidikan 10. Dibawah Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama 1) 11. Dibawah Seksi PTK Sekolah Dasar 1) Pengelola Peserta Didik 12. Dibawah Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal 1) 13. Dibawah Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman 1) Analis Pelestarian Cagar	

Jabatan Struktural Sebelumnya	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
3. Kepala Seksi Pengembangan Kesenian	Budaya dan Permuseuman 2) Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum 14. Dibawah Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi 1) Pengelola Data Komunitas Adat 15. Dibawah Kepala Seksi Pengembangan Kesenian 1) Analis Kesenian dan Budaya Daerah	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Tabel: 1.2 Peta Penyetaraan Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional
1. Subbag Perencanaan dan Penyelenggara Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah	1. Perencana Ahli Muda
2. Subbag Keuangan & Barang Milik Daerah	2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	3. Widyaprada Ahli Muda
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD	4. Widyaprada Ahli Muda
5. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP	5. Widyaprada Ahli Muda
6. Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal	6. Widyaprada Ahli Muda
7. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	7. Pamong Budaya Ahli Muda
8. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	8. Pamong Budaya Ahli Muda
9. Kepala Seksi Pengembangan Kesenian	9. Pamong Budaya Ahli Muda

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022,

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kependidikan Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 82 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.3 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi							Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S3	S2	S1	D3	D2	SMA	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1			1						1	
B	Jabatan Administrator												
	1. Administrator	6	6		1	2	3					6	
	2. Pengawas	8	4	4		2	6					8	
	3. Pelaksana	39	33	26		1	22	20	1	15		39	20
C	Jabatan Fungsional	9	6	3		1	8					9	
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>20</b>

Sumber: Data Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.4 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Pengelola Kepegawaian	4	4	0
	Pengadministrasi Umum	2	1	1
	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0
	Bendahara	1	1	0
	Verifikator Keuangan	5	5	0
	Analisis Keuangan	1	1	0
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	2	0
	Pengelola Bahan Perencanaan	2	2	0
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
	Pengelola Pendidikan	1	1	0
	Pengadministrasi Kependidikan	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	1	0
Bidang Pembinaan SD	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	1	0	1
	Pengelola Kurikulum	1	1	0
	Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan	1	0	1
	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	1	1	0
	Analisis Sarana Pendidikan	1	0	1
	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	1	1	0
	Pengelola Peserta Didik	1	1	0
	Analisis Peserta Didik	1	0	1
	Pembina Karakter	1	0	1
	Pengelola Data	1	0	1
	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	1	0	1
Bidang Pembinaan SMP	Pengelola Kurikulum	1	1	0
	Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan	1	1	0
	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	1	0	1
	Analisis Sarana Pendidikan	1	1	0
	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	1	0	1
	Pengelola Peserta Didik	1	1	0
	Analisis Peserta Didik	1	1	0
	Pembina Karakter	1	0	1
	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	1	1	0
	Pengelola Kurikulum	1	0	1
	Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan	1	0	1
Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal	Analisis Sarana Pendidikan	1	0	1
	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	1	1	0
	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	1	0	1
	Pengelola Peserta Didik	1	0	1
	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	1	1	0



Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
	Pembina Karakter	1	0	1
Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	1	0
	Pengelola Tenaga Kependidikan	1	1	0
	Analisis Tenaga Kependidikan	1	0	1
	Pengelola Tenaga Kependidikan	1	1	0
	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	0	1
	Analisis Tenaga Kependidikan	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	Pengelola Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	1	0	1
	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	1	0	1
	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	1	1	0
Bidang Kebudayaan	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Pengelola Data Komunitas Adat	1	1	0
	Pengelola Data Sejarah	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	1	1	0
	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Jabatan Fungsional	JF Penilik Utama/ Madya/ Muda/ Pertama	12	6	6
	JF Pengawas Sekolah Utama/ Madya/ Muda	24	14	10
	JF Pamong Belajar Madya/ Muda/ Pertama	6	4	2
	JF Pamong Budaya Madya/ Muda/ Pertama	2	0	2
	JF Pamong Budaya Penyelia/ Mahir/ Terampil	2	0	2
	JF Guru Utama/ Madya/ Muda/ Pertama	2.306	1.632	674
<b>TOTAL</b>		<b>2.420</b>	<b>1.695</b>	<b>725</b>

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.5 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	244	26.722.557.830,06
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	14	28.950.000,00
		Alat-alat Angkut	2	99.600.000
		Alat Pertanian	77	167.265.000
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.267	5.020.636.372
		Alat Studio Komunikasi	17	114.685.950
		Alat Laboratorium	152	698.127.000
		Alat Persenjataan		
		Alat Komputer	978	7.189.341.096
		Alat Peraga	3	74.316.000
		DII (diisi sesuai dengan Jenis di KIB )		
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	608	30.928.729.324
		Gedung Rumah Dinas		
		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	15	1.147.770.800
		DII (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan		
		Jembatan		
		Instalasi Listrik dan Telp		
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	3	7.144.000
		Barang Bercorak Kesenian		
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud		
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1	1.443.825

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

### 1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas;
2. Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
3. Meningkatkan manajemen sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi kurikulum nasional dengan muatan lokal;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi;
5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pendidik baik PNS dan Non PNS.
6. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran BOS tepat waktu dan sasaran penggunaannya;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;
8. Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;
9. Penggalan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah, budaya lokal dan seni daerah.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

KEKUATAN	KELEMAHAN
Iklim dan lingkungan kerja yang kondusif	Sarana prasaran bidang pendidikan dan kebudayaan
Kualitas tenaga pendidik	Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan
Bertambahnya pagu anggaran untuk peningkatan mutu pegawai	SOP dan peraturan banyak yang belum ada
	data situs budaya tidak valid
	Pemerataan sumber daya manusia
<b>Peluang</b>	<b>Ancaman</b>
prestasi siswa cukup membanggakan	Akulturas budaya dengan budaya asing
banyak sekolah unggulan di kota	Kemajuan teknologi
terbentuknya sanggar budaya baru	Dinamisnya komposisi penduduk
Keterlibatan pihak swasta dalam pendidikan	tupoksi masih ada yang overlapping
Dukungun pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan	
Keragaman seni budaya	

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang “membumi” dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari pemetaan dan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal diatas, maka dapat dirumuskan alternatif-alternatif strategi sebagai berikut :

S + O	W + O
Meningkatkan prestasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Optimalisasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan
	Meningkatkan jumlah sekolah unggulan melaui pemerataan sumber daya manusia
	Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui koordinasi dengan pihak terkait.
	Mengembangkan keragaman seni dan budaya melalui validasi data seni budaya
<b>S + T</b>	<b>W + T</b>
Memanfaatkan kemajuan teknologi melalui peningkatan mutu pegawai	Optimalisasi efektivitas dan efisiensi tupoksi dinas melalui pembuatan SOP

Setelah menemukan alternatif-alternatif strategi yang akan diambil melalui analisa SWOT diatas, maka untuk mempertajam dan menjadikan alternatif-alternatif tersebut diatas menjadi strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat , maka langkah selanjutnya

adalah meletakkan alternatif-alternatif strategi tersebut diatas kedalam tabel *Balance Scorecard* sebagaimana dibawah ini ;

No	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan prestasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuaitas pendidikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan dan pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan pendidikan.
		Optimalisasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan Meningkatkan jumlah sekolah unggulan melaui pemerataan sumber daya manusia Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui koordinasi dengan pihak terkait.	
2	Perspektif Kelembagaan	Mengembangkan keragaman seni dan budaya melalui validasi data seni budaya	Melestarikan keragaman seni dan budaya daerah melalui optimalisasi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana di bidang kebudayaan.
		Optimalisasi efektivitas dan efisiensi tupoksi dinas melalui pembuatan SOP	
		Memfaatkan kemajuan teknologi melalui peningkatan mutu pegawai	

Dari telaah dan analisis SWOT matrik diatas maka dapat di tarik arah kebijakan yang akan di ambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan Misi Ke dua dan Ke enam, yaitu :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
3. Pemenuhan sarana prasana pendidikan
4. Optimalisasi data kebudayaan
5. Pengembangan nilai budaya

#### 1.4 Permasalahan Utama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur penyelenggaraan Pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Strategis Pengembangan Pola Pendidikan Berbasis IPTEK dan IMTAQ Menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu dan teknologi yang mampu mewujudkan kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan dengan didasarkan atas nilai keimanan dan budi perkerti luhur dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.
2. Strategis Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (Berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau Memiliki penekanan pada akses layanan pendidikan dalam ruang lingkup dan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.
3. Strategis Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Memperbaiki mutu pendidikan pada tiap periode waktu perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

### 1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

#### Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

#### Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

#### Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

#### Lampiran-lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN  
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,  
K = KETAKWAAN,  
H = HARMONIS,  
L = LANGGENG,  
A = AMAN,  
S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,  
U = UNGGUL,  
R = RELIGIUS,  
A = AMANAH,  
N = NYATA,  
I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **Kedua** yaitu:

**“MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN  
DAN OLAH RAGA”**



Dan misi **Keenam** yaitu :

**“MELESTRARIKAN SITUS BUDAYA, KESENIAN LOKAL DAN MASYARAKAT LAINNYA  
GUNA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA”**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-N				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,8	13	13,19	13,38	13,57
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,43	8,63	8,82	9,01	9,2
2	Melestarikan seni dan budaya daerah	Lestarnya seni dan budaya daerah	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	95	95	95	96	96
			Jumlah Situs budaya yang dilestarikan	3	3	3	3	4

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

Namun berdasarkan hasil evaluasi sapk oleh kemenpan RB tanggal 13 Agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan sebagaimana pada tujuan dan sasaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.50 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten kotawaringin Barat.

Tabel: 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-N			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13	13,19	13,38	13,57
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,82	9.01	9,2
2	Peningkatan pariwisata Daerah	Meningkatnya Kelestarian seni dan Budaya	Persentase Cagar Budaya yang lestari	41	59	76	100

Sumber: Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2022

### Tujuan dan Sasaran

Seusai dengan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 maka ada 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-N			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD > 40%	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	38.70	39.20	39.70	40.20
2		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A > 83%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81.90	82.40	82.90	83.40
3		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A > 99%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	98.00	98.50	99.00	99.50
4		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B > 62%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	61.11	61.61	62.11	62.61

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-N			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9
5		Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B > 83%	Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	82.18	82.68	83.18	83.68
6		Angka Kelulusan SD/MI/Paket A > 99%	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.01	99.01	99.01	99.01
7		Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B = 100%	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99.40	99.6	99.8	100
8		Angka Putus Sekolah SD/MI maksimal 0,09%	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.12	0.11	0.10	0.09
9		Angka Putus Sekolah SMP/MTs maksimal 0,26%	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.44	0.43	0.42	0.41
10		Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B > 99%	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99.82	99.83	99.84	99.85
11		Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C >99%	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	99.22	99.23	99.24	99.25
12		Sekurang-kurangnya 41% guru PAUD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	39.54	40.04	40.54	41.04
13		Sekurang-kurangnya 91% guru SD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	90.38	90.72	91.06	91.4
14		Sekurang-kurangnya 97% guru SMP berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	97.24	97.58	97.58	97.92
15		Sekurang - kurangnya 17% tanaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	9.00	11.00	13.00	15.00
16		Sekurang - kurangnya 72% tanaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	64.00	66.00	68.00	70.00
17		Sekurang - kurangnya 62% tanaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	54.10	56.1	58.1	60.1
18		Meningkatnya Derajat pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13	13,19	13,38	13,57
19			Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,82	9.01	9,2
20	Peningkatan pariwisata Daerah	Meningkatnya Kelestarian seni dan Budaya	Persentase Cagar Budaya yang lestari	41	59	76	100

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2022

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Penjumlahan dari penduduk yang bersekolah usia 7-23 tahun menurut umur  ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-23 tahun	BPS	-
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani  ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	BPS	-
Meningkatnya Kelestarian seni dan Budaya	Persentase situs dan cagar budaya yang lestari	Jumlah Cagar budaya yang dipelihara/Target pertahun cagar budaya yang pelihara X 100%	Bidang Kebudayaan	Data bidang

Sumber: SK Kepala Dinas Dikbud No. 200 Tahun 2019

## 2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap

sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD > 40%	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	40.20
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A > 83%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83.40
3	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A > 99%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	99.50
4	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B > 62%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	62.61
5	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B > 83%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	83.68
6	Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A > 99%	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.01
7	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B = 100%	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	100
8	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI maksimal 0,09%	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.09
9	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs maksimal 0,26%	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.41
10	Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B > 99%	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99.85
11	Meningkatnya Angka Melanjutkan dari	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke	99.25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
	SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C >99%	SMA/MA/SMK/Paket C	
12	Sekurang-kurangnya 41% guru PAUD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	41.04
13	Sekurang-kurangnya 91% guru SD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	91.40
14	Sekurang-kurangnya 97% guru SMP berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	97.92
15	Sekurang - kurangnya 17% tanaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	15.00
16	Sekurang - kurangnya 72% tanaga pendidik SD tersertifikasi	Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	70.00
17	Sekurang - kurangnya 62% tanaga pendidik SMP tersertifikasi	Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	60.10
18	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13.57
19	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	9.2
20	Meningkatnya Kelestarian seni dan Budaya	Persentase situs dan cagar budaya yang lestari	100

Sumber: Data Diolah

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD > 40%	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	40.20
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A > 83%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83.40
3	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A > 99%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	99.50
4	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B > 62%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	62.61
5	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B > 83%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	83.68
6	Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A > 99%	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.01
7	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B = 100%	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	100
8	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI maksimal 0,09%	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.09
9	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs maksimal 0,26%	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.41
10	Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B > 99%	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99.85
11	Meningkatnya Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C > 99%	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	99.25
12	Sekurang-kurangnya 41% guru PAUD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	41.04
13	Sekurang-kurangnya 91% guru SD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	91.40

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
14	Sekurang-kurangnya 97% guru SMP berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	97.92
15	Sekurang - kurangnya 17% tenaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	15.00
16	Sekurang - kurangnya 72% tenaga pendidik SD tersertifikasi	Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	70.00
17	Sekurang - kurangnya 62% tenaga pendidik SMP tersertifikasi	Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	60.10
18	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13.57
19	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	9.2
20	Meningkatnya Kelestarian seni dan Budaya	Persentase situs dan cagar budaya yang lestari	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Derajat pendidikan Masyarakat				
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>				
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>54,935,325,020.00</b>	<b>57,297,601,468.00</b>	<b>2,362,276,448.00</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	212,000,000.00	212,000,000.00
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,658,200,000	1,658,200,000	-
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,158,600,000	1,300,700,000	142,100,000.00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	488,700,000	588,700,000	100,000,000.00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,944,460,000	4,054,460,000	110,000,000.00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,105,300,000	1,100,300,000	(5,000,000.00)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4,248,840,600	4,358,840,600	110,000,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	765,896,000	765,896,000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	25,000,000	25,000,000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	481,000,000	481,000,000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	287,180,000	287,180,000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	302,100,000	302,100,000	-
	Pengadaan Mebel Sekolah	2,751,650,000	2,959,350,000	207,700,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Siswa		150,048,802.00	150,048,802.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	0	0	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7,515,000,000	7,515,000,000	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	89,032,190	89,032,190	-
	Penyiapan tindak dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	25,310,000	25,310,000	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	49,999,950	89,809,596	39,809,646.00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,320,163,300	2,615,781,300	1,295,618,000.00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	29,999,750.00	29,999,750.00	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30,000,000	30,000,000	-
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28,658,893,230	28,658,893,230	-
	Peningkatan kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah dasar	0	114,999,750	114,999,750.00
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3,875,100,000	3,875,100,000	-
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>35,060,978,192.00</b>	<b>36,530,571,268.00</b>	<b>1,469,593,076.00</b>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penambahan Ruang Kelas Baru	550,000,000.00	550,000,000.00	-
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	505,305,000.00	505,305,000.00	-
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	633,947,000.00	633,947,000.00	-
	Pembangunan Laboratorium	5,200,848,000.00	5,200,848,000.00	-
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,312,780,812.00	1,564,880,812.00	252,100,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,406,143,000.00	3,406,143,000.00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1,015,670,000.00	1,015,670,000.00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	158,940,000.00	158,940,000.00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,160,689,000.00	1,160,689,000.00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1,933,496,000.00	1,933,496,000.00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	152,100,000.00	152,100,000.00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,031,955,000.00	1,031,955,000.00	-
	Pengadaan Mebel Sekolah	2,416,450,000.00	2,416,450,000.00	-
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	144,169,200.00	144,169,200.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	-	263,939,940.00	263,939,940.00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2,219,900,000.00	2,219,900,000.00	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	84,779,500.00	61,470,250.00	(23,309,250.00)
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19,510,000.00	25,534,850.00	6,024,850.00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	49,999,810.00	125,932,670.00	75,932,860.00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	654,000,000.00	1,308,000,000.00	654,000,000.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29,403,300.00	29,403,300.00	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	31,955,000.00	31,955,000.00	-
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12,493,106,770.00	12,589,842,246.00	96,735,476.00
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>10,558,190,465.00</b>	<b>10,591,629,165.00</b>	<b>33,438,700.00</b>
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	854,057,574.00	854,057,574.00	-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3,233,349,971.00	3,233,349,971.00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	232,998,000.00	232,998,000.00	-
	Pengadaan Mebel PAUD	49,999,590.00	49,999,590.00	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-	-	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	521,738,180.00	521,738,180.00	-
	penyelenggaraan proses belajar PAUD	29,997,750.00	28,647,750.00	(1,350,000.00)
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	29,999,600.00	29,999,600.00	-
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	24,970,000.00	25,844,800.00	874,800.00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	89,879,800.00	123,793,700.00	33,913,900.00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5,491,200,000.00	5,491,200,000.00	-
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>2,606,109,072.00</b>	<b>2,691,309,072.00</b>	<b>85,200,000.00</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,143,260,000.00	1,143,260,000.00	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	34,999,072.00	120,199,072.00	85,200,000.00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,427,850,000.00	1,427,850,000.00	-
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>				
	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>20,030,280.00</b>	<b>20,030,230.00</b>	<b>(50.00)</b>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,030,280.00	20,030,230.00	(50.00)
	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	-
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20,000,000.00	20,000,000.00	-
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				
	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>3,302,479,460.00</b>	<b>5,242,428,400.00</b>	<b>1,939,948,940.00</b>
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39,909,900.00	39,909,900.00	-
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,262,569,560.00	5,202,518,500.00	1,939,948,940.00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				
	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>919,242,686.00</b>	<b>1,765,682,536.00</b>	<b>846,439,850.00</b>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	230,000,000.00	951,199,850.00	721,199,850.00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	689,242,686.00	814,482,686.00	125,240,000.00
	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,209,845,779.00</b>	<b>1,343,068,779.00</b>	<b>133,223,000.00</b>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14,979,750.00	108,202,750.00	93,223,000.00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1,194,866,029.00	1,234,866,029.00	40,000,000.00
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>				
	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>9,990,500.00</b>	<b>38,859,500.00</b>	<b>28,869,000.00</b>
	Pelindungan Cagar Budaya	9,990,500.00	38,859,500.00	28,869,000.00

*Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022*

Tabel: 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>408,525,781,868.00</b>	<b>424,635,430,347.00</b>	<b>16,109,648,479.00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,635,000	13,635,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	69,758,851	51,914,851	(17,844,000.00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13,481,521	15,944,871	2,463,350.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13,900,000	13,900,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15,437,000	15,800,253	363,253.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,150,060	5,126,698	(2,023,362.00)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85,702,550	129,970,550	44,268,000.00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>203,523,233,673</b>	<b>210,994,953,809</b>	<b>7,471,720,136</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	203,351,637,473	210,823,357,609	7,471,720,136.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65,596,200	65,596,200	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	106,000,000	106,000,000	-
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>51,999,800</b>	<b>500,000,000</b>	<b>448,000,200</b>
	Pengamanan Barang Milik daerah		500,000,000.00	500,000,000.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21,999,950.00	-	(21,999,950.00)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	29,999,850.00	-	(29,999,850.00)
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>198,209,900</b>	<b>270,507,600</b>	<b>72,297,700</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	108,000,000.00	91,100,000.00	(16,900,000.00)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14,999,900.00	-	(14,999,900.00)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75,210,000.00	179,407,600.00	104,197,600.00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>526,981,725</b>	<b>621,488,183</b>	<b>94,506,458</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44,988,910	39,427,770	(5,561,140.00)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169,682,475	175,952,323	6,269,848.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,830,000.00	-	(5,830,000.00)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,347,030	21,347,030	9,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101,306,310	107,757,060	6,450,750.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192,827,000	277,004,000	84,177,000.00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>35,957,360.00</b>	<b>35,957,360.00</b>
	Pengadaan Mebel	-	17,575,000.00	17,575,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	18,382,360.00	18,382,360.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>743,844,066.00</b>	<b>763,921,693.00</b>	<b>20,077,627.00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305,999,592	240,774,674	(65,224,918.00)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437,844,474	523,147,019	85,302,545.00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>446,611,300.00</b>	<b>393,111,300.00</b>	<b>(53,500,000.00)</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,935,400	19,935,400	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,678,000	134,678,000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,997,900	77,997,900	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214,000,000.00	160,500,000.00	(53,500,000.00)

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 20 (Dua Puluh) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:



Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Parisipasi Kasar (APK) PAUD > 40%	Angka Parisipasi Kasar (APK) PAUD	40.20	38.60	96.02	Sangat tinggi
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A > 83%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83.40	98.20	117.75	Sangat tinggi
3	Angka Parisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A > 99%	Angka Parisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	99.50	103.22	103.74	Sangat tinggi
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B > 62%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	62.61	79.59	127.12	Sangat tinggi
5	Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B > 83%	Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	83.68	87.07	104.05	Sangat tinggi
6	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A > 99%	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.01	99.88	100.88	Sangat tinggi
7	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B = 100%	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	100.00	101,85	101,85	Sangat tinggi
8	Angka Putus Sekolah SD/MI maksimal 0,09%	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.09	0.15	0.09	Tinggi
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs maksimal 0,26%	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.41	0.48	0.41	Sedang
10	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B > 99%	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	99.85	80.24	80.36	Tinggi
11	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C >99%	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/ Paket B ke SMA/MA/SMK/ Paket C	99.25	83.64	84.27	Tinggi
12	Sekurang-kurangnya 41% guru PAUD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	41.04	35.54	86.60	Tinggi
13	Sekurang-kurangnya 91% guru SD berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	91.40	91.22	99.80	Sangat tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
14	Sekurang-kurangnya 97% guru SMP berkualifikasi S1/D4	Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	97.92	95.28	97.30	Sangat tinggi
15	Sekurang - kurangnya 17% tanaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	15.00	5.22	34.80	Rendah
16	Sekurang - kurangnya 72% tanaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	70.00	41.65	59.50	Rendah
17	Sekurang - kurangnya 62% tanaga pendidik PAUD tersertifikasi	Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	60.10	46.00	76.54	Sedang
18	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13.57	12.75	93.96	Sangat tinggi
19	Meningkatnya kesadaran pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	9.2	8.65	92.83	Sangat tinggi
20	Lestarnya seni dan budaya daerah	Persentase situs dan cagar budaya yang lestari	100	100.00	100.00	Tinggi
Capaian Kinerja					83.49	

Sumber: Data diolah

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

#### 1 Sasaran 1 : Angka Parisipasi Kasar (APK) PAUD

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 96,02% yang berarti masuk dalam kategori “Sangat tinggi” dengan realisasi sebesar 38,60%.

Berdasarkan data di atas, target APK PAUD tahun 2022 tidak tercapai. Upaya yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Program

Pengelolaan PAUD secara besar terbagi dalam 2 (dua) hal yakni Peningkatan Akses Layanan dan Peningkatan Mutu Satuan.

Program peningkatan akses layanan paud dilaksanakan dengan memperbanyak satuan PAUD di desa / kelurahan. Pada tahun 2021 Jumlah Layanan PAUD sebanyak 171 Satuan PAUD (137 TK, 40 KB, 4 TPA) dan 13 RA sedangkan pada tahun 2022 terdapat 190 Satuan PAUD (144 TK, 41 KB, 5 TPA) serta 13 RA (Raudhatul Athfal) yang sudah memiliki ijin pendirian dan operasional dan masuk di Dapodik maupun Emis. Kondisi tersebut menggambarkan adanya peningkatan sebanyak 19 satuan PAUD Baru yang ada di Kotawaringin Barat dan diantaranya penambahan 1 (satu) TK Negeri yakni TKN Pembina Arut Utara sehingga di Tahun 2022 seluruh Kecamatan memiliki TK Negeri Pembina.

Pada tahun 2022 terdapat Peningkatan Jumlah Peserta Didik PAUD jika dibandingkan dengan Peserta Didik Tahun 2021. Pada Tahun 2021 jumlah peserta Didik berdasarkan Dapodik Sebanyak 9.338 siswa dengan rincian 8.401 Siswa PAUD (TK, KB, TPA) dan Peserta Didik RA sebanyak 931 Siswa. Sedangkan Jumlah Peserta Didik Tahun 2022 sebanyak 10.394 siswa dengan rincian 9.439 Siswa PAUD (TK, KB,TPA) dan 955 siswa RA. Kondisi tersebut menggambarkan adanya peningkatan Cakupan Layanan PAUD di Kotawaringin Barat sebanyak 1.056 Siswa.

## **2 Sasaran 2 : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 113,19% yang berarti masuk dalam kategori “Sangat tinggi” dengan capaian target tercapai yakni sebesar 94,4%.

Keberhasilan indikator ini meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2022 meskipun dalam masa pasca pandemi, masyarakat yang memiliki anak usia 7-12 tahun berbekal dari pengalaman semasa pandemi, orang tua lebih perhatian lagi terhadap anaknya akan pentingnya pendidikan disekolah.

Untuk dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 ke depan, salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan fokus program dan kegiatan per

bidang, sehingga di harapkan pengelolaan APM jenjang SD kedepan akan lebih baik lagi meskipun target realisasi telah terlampaui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kotawaringin barat akan lebih aktif lagi melakukan kegiatan sosialisasi dan pengaturan usia sekolah kepada masyarakat.

### **3 Sasaran 3 : Angka Parisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 104,82 % yang berarti masuk dalam kategori “Sangat tinggi” target tercapai yakni sebesar 104,3%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tercapainya target indikator tersebut dikarenakan partisipasi anak usia dibawah 6 tahun dan diatas 12 tahun meningkat serta peran pemerintah terhadap kepedulian pendidikan terutama dengan meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan sampai ke pelosok.

Untuk dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 ke depan, salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan fokus program dan kegiatan per bidang, sehingga di harapkan pengelolaan APK jenjang SD ini tetap mencapai target, antara lain dengan melakukan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak sedang atau berat serta melengkapi sarana dan prasarana sekolah.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan sub kegiatan Pengeloaan Pendidikan Sekolah Dasar.

#### **4 Sasaran 4 : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 130,70% yang berarti masuk dalam kategori “Sangat tinggi” dengan capaian target tercapai yakni sebesar 81,18%.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Sebagai gambaran misalnya APM SMP adalah proporsi jumlah murid SMP yang berusia 13-15 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun.

Keberhasilan indikator ini meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2022, diikuti dengan kesadaran masyarakat yang memiliki anak usia 13-15 tahun bersekolah di jenjang sekolah Menengah Pertama serta sarana prasana sekolah yang dibangun pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2022 adalah meningkatkan jumlah sarana dan prasarana sekolah dan fasilitasnya melalui dana DAK dan APBD tahun 2022 di beberapa sekolah baik negeri maupun swasta untuk mencapai SPM, yang sebagian besar didanai dari DAK.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 ke depan, salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan fokus program dan kegiatan per bidang, sehingga di harapkan pengelolaan APM jenjang SMP ini lebih baik lagi, antara lain dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada saat penerimaan siswa baru.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan sub kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

### **5 Sasaran 5 : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 119,98% yang berarti masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” meskipun target tidak tercapai yakni sebesar 100,4%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk diluar usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tercapainya target indikator tersebut menunjukan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2022 adalah meningkatkan jumlah sarana dan prasarana sekolah dan fasilitasnya melalui dana DAK dan APBD tahun 2022 dibeberapa sekolah baik negeri maupun swasta untuk mencapai SPM, yang sebagian besar didanai dari DAK. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 ke depan, salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan fokus program dan kegiatan per bidang, sehingga di harapkan pengelolaan APK jenjang SMP ini bisa lebih baik lagi, antara lain dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada saat penerimaan siswa baru.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

## **6 Sasaran 6 : Angka Kelulusan SD/MI/Paket A**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 100,88 % yang berarti masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan target tercapai yakni sebesar 99,88%.

Tercapainya target realisasi angka kelulusan merupakan kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran Masa pandemi 2020 s.d. 2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 s.d. 2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemi 2021 s.d. 2022 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP)

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 ke depan, salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan fokus program dan kegiatan per bidang, sehingga di harapkan pengelolaan Angka Kelulusan jenjang SD ini dapat lebih baik lagi.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.

## **7 Sasaran 7 : Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 98,69% yang berarti masuk dalam kategori “sangat tinggi” meskipun target tidak tercapai yakni sebesar 98,69%.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kemendikburistek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 s.d. 2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 s.d. 2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemi 2021 s.d. 2022 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP)

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan ada di beberapa siswa di sekolah yang telah terdata pada peserta ujian sekolah namun saat pelaksanaan ujian siswa yang bersangkutan yang tidak mengikuti ujian / tidak datang tanpa alasan yang jelas. Sekolah telah berupaya berkoordinasi/komunikasi dengan orang tua siswa untuk ujian susulan namun dengan berbagai alasan siswa tersebut tidak mau mengikuti/berhenti sekolah. Upaya yang sudah dilakukan selain pemenuhan sarpras, ditahun 2022 dilaksanakan program kegiatan Evaluasi diri sekolah dan peningkatan mutu



pendidikan untuk persiapan pelaksanaan Kurikulum Merdeka serta sosialisasi evaluasi Akreditasi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di setiap satuan pendidikan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 ke depan, salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan fokus program dan kegiatan per bidang serta berinovasi/ meningkatkan pelatihan/ kompetensi guru terutama terkait pelaksanaan kurikulum merdeka di masa pasca pandemi, pembelajaran luring/tatap muka siswa lebih fokus untuk belajar dan berkreasi sesuai bakat dan minat siswa, sehingga di harapkan pengelolaan Angka Kelulusan jenjang SMP ini dapat lebih baik lagi.

### **8 Sasaran 8 : Angka Putus Sekolah SD/MI**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 0,09 % yang berarti masuk dalam kategori “Sangat rendah” karena target tidak tercapai hanya sebesar 0,15 %.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan ada beberapa orang tua yang tingkat kepedulian terhadap pendidikan masih kurang serta kurang pahamnya akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya, faktor ekonomi salah satu kendala juga tidak tercapainya target angka putus sekolah, ketika masuk sekolah pasca pandemi ini ada beberapa siswa yang tidak mau sekolah, Pihak sekolah telah berupaya untuk berkomunikasi dengan orang tua murid agar menyekolahkan kembali anaknya, namun dengan berbagai alasan orang tua maupun anaknya tidak mau masuk lagi sekolah.

Berbagai upaya Pemerintah telah dilakukan, diantaranya adalah dengan pemberian pemenuhan dasar belajar bagi peserta didik terutama untuk peserta didik kurang mampu, pemberian beasiswa, penyaluran dana PIP, pemberian BOS dan pengaturan masalah pungli, serta peran serta aktif Pemerintah dalam sosialisasi pendidikan di Kecamatan dan Desa Desa, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat akan terus berkoordinasi dengan guru/ pengawas untuk berinovasi bagaimana

menciptakan pembelajaran yang membuat siswa tidak bosan/ jenuh dalam proses pembelajarannya.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan kegiatan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.

## **9 Sasaran 9 : Angka Putus Sekolah SMP/MTs**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 0,41 % yang berarti masuk dalam kategori “rendah” karena target tercapai hanya sebesar 0,5%.

tercapainya target indikator tersebut dikarenakan dimasa pasca Pandemi Covid -19 proses pembelajaran dilakukan secara luring/tatap muka sehingga siswa lebih focus perlu bimbingan yang lebih dari orang tua selain guru, salah satu faktor social ekonomi berpengaruh terhadap angka putus sekolah terutama siswa yang berada diwilayah terpencil, siswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang hampir dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun karena pembelajaran secara mandiri di rumah serta kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya dan perlu peranan orang tua siswa yang mendukung anaknya untuk terus sekolah.

Salah satu langkah Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan pemberian beasiswa, penyaluran dana PIP, pemberian BOS dan pengaturan masalah pungli, serta peran serta aktif dalam sosialisasi pendidikan di Kecamatan dan Desa Desa serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat akan terus berkoordinasi dengan guru/ pengawas untuk berinovasi bagaimana menciptakan pembelajaran disekolah yang membuat siswa tidak bosan/ jenuh dalam proses pembelajarannya.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

## **10 Sasaran 10 : Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 80,36 % yang berarti masuk dalam kategori “tinggi” sedangkan target tidak tercapai hanya sebesar 80,24%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain karena perpindahan mutasi penduduk yang melanjutkan sekolah ke SMP di luar Kabupaten Kotawaringin Barat, memilih memasukan anaknya ke pesantren/ sekolah islam terpadu yang mana orang tua beranggapan selain anak-anaknya mendapatkan pelajaran umum juga akan bertambah ilmu agamanya, dan siswa yang melanjutkan ke sekolah yg belum mempunyai ijin opsional tidak terdata, serta sebagian kecil di karenakan faktor ekonomi, terutama di daerah pesisir.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan pemberian beasiswa, penyaluran dana PIP, pemberian BOS dan pengaturan masalah pungli, serta peran serta aktif dalam mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak di usia sekolah.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.

## **11 Sasaran 11 : Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 84,27% yang berarti masuk dalam kategori “tinggi” dengan target tercapai sebesar 83,64%.

Data di atas merupakan jumlah siswa baru melanjutkan sekolah di kabupaten kotawaringin barat, sedangkan untuk data siswa yang melanjutkan ke luar kabupaten kotawaringin barat hanya sebagian kecil datanya tercatat di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kotawaringin barat, hal ini bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pesantren tidak memerlukan rekomendasai dari dinas pendidikan dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan lagi capaian tahun berikutnya, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan pemberian beasiswa, penyaluran dana PIP, pemberian BOS dan pengaturan masalah pungli, serta peran serta aktif dalam sosialisasi pendidikan di Kecamatan dan Desa Desa.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Sekolah Menengah Pertama.

## **12 Sasaran 12 : Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 86,60% yang berarti masuk dalam kategori “tinggi” dengan target realisasi tercapai hanya sebesar 35,54%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan, kurangnya perhatian sekolah terutama swasta PAUD dalam hal peningkatan kualitas dan kemampuan guru serta dalam rekrutmen guru pada sekolah di yayasan/ swasta tidak mengharuskan ijazah S1.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya telah berupaya pemberian insentif untuk guru TK/PAUD Non PNS yang mengutamakan guru TK/PAUD yang sedang menempuh pendidikan S1 agar dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas akademiknya.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **13 Sasaran 13 : Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa

capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 99,80 % yang berarti masuk dalam kategori “sangat tinggi” dengan target realisasi tercapai hanya sebesar 91,22%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut masih adanya tenaga pendidik (guru) yang belum berijazah S1, berdasarkan analisis data kepegawaian, rata-rata guru yang belum berijazah S1 berusia 50 tahun keatas dan mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun karena sesuai dengan ketentuan berdasarkan surat edaran kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 466/B/DU/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang batas waktu pemenuhan kualifikasi akademik S1 terkait syarat pembayaran tunjangan profesi guru, kriteria, umur dan masa kerja, pada point 4.a sub. Point 2 menjelaskan tentang pengecualian guru yang belum memiliki kualifikasi Akademik S1/D4 tetapi sudah mencapai usia 50 tahun pada tanggal 30 nopember 2013 dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi Angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a. *sehingga berdasarkan ketentuan tersebut mengakibatkan masih banyak tenaga pendidik (guru) berusia ;lanjut yang tidak serius untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1/D4 .*

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan mensosialisasikan standar minimal jenjang pendidikan untuk pendidik sekolah dasar, memberikan batas standar minimal jenjang pendidikan S-1 bagi calon guru honorer sekolah terutama guru honor di sekolah swasta.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

# 14

## **Sasaran 14 : Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 97,30% yang berarti masuk dalam kategori “ tinggi” dengan target tercapai hanya sebesar 95,28%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan, kurangnya perhatian sekolah terutama swasta SMP dalam hal peningkatan kualitas dan kemampuan guru serta dalam rekrutmen guru pada sekolah di yayasan/ swasta tidak mengharuskan ijazah S1.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan dan peningkatan kualitas pendidik melalui bimtek, diklat dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik (guru) agar mendorong guru yang berada di sekolah swasta untuk menempuh/melanjutkan program S1.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan.

# 15

## **Sasaran 15 : Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 34,80% yang berarti masuk dalam kategori “sangat rendah” meskipun realisasi tidak tercapai karena target tercapai hanya sebesar 5,22%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan salah satu faktor diantaranya adalah keterkaitan dengan kualifikasi S1/D4, dimana masih banyak guru dan tenaga pendidik PAUD kita yang belum memiliki syarat akademik S1/D4, selain itu dikarenakan peraturan untuk mengikuti seleksi PPG (pendidikan Profesi Guru) wajib memiliki Ijazah S1.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan dan

peningkatan kualitas pendidik melalui bimtek dan diklat, serta pemberian insentif untuk guru Non PNS agar dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas akademiknya, serta pengelolaan data DAPODIK yang lebih akurat dan valid.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **16 Sasaran 16 : Persentase pendidik SD bersertifikat profesi**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 56,50% yang berarti masuk dalam kategori “rendah” karena capaian target realisasi hanya sebesar 41,65%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah keterkaitan dengan kualifikasi S1/D4, dimana masih banyak guru dan tenaga pendidik SD kita yang belum memiliki syarat akademik S1/D4, selain itu adanya batasan kuota pelaksana PPG dalam jabatan telah di tentukan oleh pemerintah pusat yang semakin memperketat seleksi pemilihan sertifikasi guru serta dan berpengaruh juga guru yang pensiun dan meninggal.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penambahan kuota pelaksana PPG setiap tahunnya.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## **17 Sasaran 17 : Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 76,54% yang berarti masuk dalam kategori “sedang” meskipun target tidak tercapai hanya sebesar 46,00%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah keterkaitan dengan kualifikasi S1/D4, dimana masih

banyak guru dan tenaga pendidik SMP kita yang belum memiliki syarat akademik S1/D4, selain itu adanya batasan kuota pelaksana PPG dalam jabatan telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang semakin memperketat seleksi pemilihan sertifikasi guru serta dan berpengaruh juga guru yang pensiun dan meninggal.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penambahan kuota pelaksana PPG setiap tahunnya. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **18 Sasaran 18 : Harapan Lama Sekolah**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 93,96 % yang berarti masuk dalam kategori “sangat tinggi” dengan target tidak tercapai hanya sebesar 12,75%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan adanya arus migrasi penduduk, sebagai konsekuensi perkembangan ekonomi kabupaten kotawaringin barat, terutama pada sektor perkebunan, disinyalir sebagian besar tenaga kerja perkebunan tersebut masih berpendidikan dasar. belum tersedia dan tersebar PKBM dan kelas Jauh SKB, sebagai program kesetaraan paket A, B dan C belum bisa diakses secara merata di seluruh kotawaringin barat, selain itu target yang ditetapkan saat penetapan indikator kinerja utama terlalu tinggi, namun meskipun target tidak tercapai, capaian Angka Harapan Lama sekolah dari tahun 2017-2022 selalu terjadi kenaikan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melakukan sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa. serta mendorong penduduk di atas usia 25 tahun yang rata rata masih berpendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Non Formal.



# 19

## Sasaran 19 : Rata-rata Lama Sekolah

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 92,83% yang berarti masuk dalam kategori “sangat tinggi” dengan target tidak tercapai hanya sebesar 8,54%.

Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan karena belum cukup tersedia keragaman jurusan jenjang pendidikan S1, selain itu belum tersedia jenjang pendidikan vokasi/ diploma, jenjang S2 dan S3. selain itu target yang ditetapkan saat penetapan indikator kinerja utama terlalu tinggi, namun meskipun target tidak tercapai, capaian Angka Rata-rata Lama sekolah dari tahun 2017-2022 selalu terjadi kenaikan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melakukan tindak lanjut untuk berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat dalam pengembangan fasilitas pendidikan tinggi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melakukan tindak lanjut untuk berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat dalam pengembangan fasilitas pendidikan tinggi.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

# 20

## Sasaran 20 : Persentase cagar budaya yang lestari

Dari hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori “sangat tinggi” dengan target tercapai sebesar 100 %.

Keberhasilan pelestarian seni dan cagar budaya dalam pemenuhan target dilakukan dengan cara memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi kepada pemajuan kebudayaan, memberdayakan secara maksimal sumber daya manusia yang ada (juru pelihara) dalam memelihara cagar budaya, serta melakukan upaya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dengan melakukan event-event

budaya dalam rangka menumbuh kembangkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya khususnya budaya di Kab. Ktw. Barat.

Adapun Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia nomor : PM.28/PW.007/MKP/2008 antara lain ; Masjid Kyai Gede di Kec. Ktw. Lama, Astana Al-Nursari di Kec. Ktw. Lama dan Astana Adipati Mangkubumi di Kec. Arut Selatan. Sedangkan yang termasuk dalam situs budaya di Kab. Ktw. Barat berdasarkan Keputusan Bupati Ktw. Barat Nomor: 114 tahun 2021 antara lain; (Kec. Arut Selatan) - Istana Kuning, Gubah Besar & Gubah Kecil, Rumah Betang dan Pemandian Tujuh Putri. (Kec. Kumai) – Monumen Panglima Utar, Meriam Kubu, Monumen Merah Putih, Makam Pangeran Bendahara I dan II serta Makam Panjang Sei. Rengas. (Kec. Arut Utara) – Sepundu Zakaria bertuliskan Arab Jawi, Batu Petahan, Palagan Sambi, Rumah Adat Betang, Monumen Pantar Patih Kuta Batu, Rumah Adat Balai Antang. (Kec. Ktw. Lama) – Makam Kyai Gede dan Makam Kuta Tanah.

Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan dalam rangka melestarikan seni dan cagar budaya pada tahun 2022 antara lain :

1. Menyediakan tenaga juru pelihara pada cagar dan situs budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka memelihara dan menjaga situs/cagar budaya, dengan rincian sebagai berikut : 1 orang di Makam Gubah Kecil, 1 Orang di Makam Gubah Bosar, 3 orang di Astana Mangkubumi, 4 orang di Istana Kuning, 2 orang di Rumah Betang Pasir Panjang, 1 orang di Makan Bendahara I dan II Kumai, 1 orang di Monumen Palagan Sambi, 1 orang di Anjungan Kobar TMII Jakarta, 2 orang di Anjungan Kobar di Palangkaraya, 1 orang di Masjid Jami Kyai Gede Kolam, 1 orang di Makam Kuta Tanah Kolam, 1 orang di Astana Alnusari Kolam dan 2 orang di Makam Kyai Gede Kolam.

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Parisipasi Kasar (APK) PAUD/RA	persentase	40.20	38.60	96.02
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persentase	83.40	94.4	113.19
Angka Parisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	persentase	99.50	104.3	104.82
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persentase	62.61	81.2	129.69
Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	persentase	83.68	100.4	119.98
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	persentase	99.01	99.88	100.88
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	persentase	100.00	98.69	98.69
Angka Putus Sekolah SD/MI	persentase	0.09	0.15	0.09
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persentase	0.41	0.5	0.41
Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	persentase	99.85	80.24	80.36
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	persentase	99.25	83.64	84.27
Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	persentase	41.04	35.54	86.60
Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	persentase	91.40	91.22	99.80
Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	persentase	97.92	95.28	97.30
Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	persentase	15.00	5.22	34.80
Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	persentase	70.00	41.65	59.50
Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	persentase	60.10	46.00	76.54
Harapan Lama Sekolah	persentase	13.57	12.75	93.96
Rata-rata Lama Sekolah	persentase	9.2	8.54	92.83
Persentase situs dan cagar budaya yang lestari	persentase	100	100.00	100.00

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

**Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022  
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	38.04	38.04	35.25	40.88	38.60	38.60	102.26	99.58	91.08	104.29	97.23	93.23
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	80.74	88.24	88,17	99.55	96.39	94.4	99.80	108.40	107,65	120.81	116.27	96.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	95.02	96.19	95,67	104.16	104.33	104.3	97.96	98.66	97,62	105.75	105.38	99.65
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	56.90	66.04	65,64	79.6	81.18	81.2	94.66	108.96	107,41	129.2	130.70	101.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	80.68	81.21	81,35	85.24	100.37	100.4	99.38	99.42	98,99	103.1	120.67	117.04
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100.00	100.00	100	100	98.95	99.88	101.00	101.00	100	101	99.94	98.95
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98.65	98.65	100	100	90.17	98.69	99.65	99.45	100,6	100.4	90.35	89.99
Angka Putus Sekolah SD/MI	0.26	0.20	0,17	0.01	0.56	0.15	53.85	65.00	141,66	12.29	95.40	11.34
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.37	0.31	0,19	0.27	1.1	0.5	145.95	158.06	43,18	63.55	98.38	62.57
Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99.75	99.75	89,54	83.17	85.65	80.24	99.95	99.94	89,7	83.31	85.79	102.97
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	98.65	98.65	100	105.28	114.67	83.64	99.45	99.44	100,78	106.09	115.55	108.92
Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	35.09	33.22	30	31.73	35.22	35.54	97.37	85.09	75,87	79.25	86.88	109.62
Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	88.06	98.19	93,5	93.7	83.44	91.22	98.17	109.05	103,45	103.28	91.63	88.72
Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	96.06	98.60	97,22	70.62	82.70	95.28	99.13	101.40	99,97	72.37	84.75	117.11
Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	3.57	6.38	7,18	4.81	4.97	5.22	71.43	91.14	79,77	43.71	38.23	87.46
Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	47.87	51.22	45,04	46.94	38.28	41.65	79.78	82.61	70,37	71.13	56.29	79.14
Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	37.59	45.14	45,44	43.45	37.38	46.00	75.03	86.64	83,99	77.45	64.34	83.07
Harapan Lama Sekolah	12.13	12.69	12,69	12.72	12.73	12.75	100.00	103.34	101,84	96.44	95.14	98.65
Rata-rata Lama Sekolah	8.05	8.35	8,35	8.42	8.53	8.54	100.00	102.45	100,96	95.46	94.67	99.18
Persentase situs dan cagar budaya yang lestari	-	-	33	52.38	100.00	100.00	-	-	99	99	100.00	100.00

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Lama Sekolah dengan target pada tahun 2022 adalah 13,57 tahun dan capaian 12,75 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah tidak mencapai target dikarenakan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 = 12,75 tahun artinya penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan menamatkan Pendidikan sampai SMA/SMK/MA Pendidikan 12 tahun dan kuliah selama 0,75 Tahun atau sekitar 9 Bulan. Pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sehingga keterbatasan Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah.
2. Rata-rata Lama Sekolah dengan target pada tahun 2022 adalah 9,02 tahun dan capaian 8,54 tahun. Rata-rata Lama Sekolah tidak mencapai target dikarenakan kurangnya keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa selain itu Angka target yang di targetkan terlalu tinggi, melihat angka capaian tiap tahunnya selalu terjadi peningkatan capaian, Namun demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah daerah telah berusaha secara maksimal dengan sumber daya yang ada untuk meningkatkan Rata - Rata Lama Sekolah dengan membantu masyarakat yang ingin melanjutkan Pendidikan ditingkat Menengah melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket C atau Setara SMA dan anak putus sekolah. Hal tersebut tergambar dari peningkatan warga belajar pendidikan kesetaraan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 2.289 orang warga belajar apabila dibandingkan di tahun 2021 hanya sebanyak 1.811 orang warga belajar. Sedangkan untuk Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan ada peningkatan sebesar 2 satuan PKBM di tahun 2022 sehingga menjadi 1 SKB dan 12 PKBM yang tersebar di 4 kecamatan dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 1 SKB dan 10 PKBM dan tersebar di 3 Kecamatan.

3. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama sekolah sangat bergantung atas hasil perhitungan dari BPS.
4. Angka yang ditargetkan pada saat penetapan terlalu tinggi sehingga untuk mencapai target yang ditentukan sangatlah sulit, sedangkan target sasaran renstra dari tahun ke tahun selalu tercapai tagetnya sedangkan target sasaran RPJMD secara capaian kinerja selalu terjadi kenaikan dari tahun ketahun, dilihat dari sisi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun baik fasilitas saran dan prasarana pendidikan disekolah maupaun peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sampai dengan tahun 2022 dikabupaten Kotawaringin Barat meningkat, baik itu sarana pendidikan disekolah maupun kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan baik berupa memberikan pelatihan kompetensi maupun memberikan insentif bagi guru non ASN terutama untuk yang bertugas di daerah terpencil.
2. Memberikan beasiswa bagi siswa prestasi maupun kurang mampu, serta pemenuhan SPM pendidikan bagi siswa kurang mampu.
3. Alokasi Anggaran dana DAK meningkat dari tahun ketahun untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.
4. Pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pengolaan Pendidikan
2. Program Tenaga pendidik dan Kependidikan
3. Program pengelolaan Pengembangan Budaya

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	37.20	38.20	38.70	39.20	39.70	40.20	38.04	38.04	35.25	40.88	38.60	38.60
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	80.90	81.40	81.90	82.40	82.90	83.40	80.74	88.24	88,17	99.55	96.39	94.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.50	95.02	96.19	95,67	104.16	104.33	104.3
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	60.11	60.61	61.11	61.61	62.11	62.61	56.90	66.04	65,64	79.6	81.18	81.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	81.18	81.68	82.18	82.68	83.18	83.68	80.68	81.21	81,35	85.24	100.37	100.4
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.01	99.01	99.01	99.01	99.01	99.01	100.00	100.00	100	100	98.95	99.88
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99.00	99.20	99.40	99.60	99.80	100.00	98.65	98.65	100	100	90.17	98.69
Angka Putus Sekolah SD/MI	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.26	0.20	0,17	0.01	0.56	0.15
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.54	0.49	0.44	0.43	0.42	0.41	0.37	0.31	0,19	0.27	1.1	0.5
Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99.80	99.81	99.82	99.83	99.84	99.85	99.75	99.75	89,54	83.17	85.65	80.24
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	99.20	99.21	99.22	99.23	99.24	99.25	98.65	98.65	100	105.28	114.67	83.64
Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	36.04	39.04	39.54	40.04	40.54	41.04	35.09	33.22	30	31.73	35.22	35.54
Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	89.70	90.04	90.38	90.72	91.06	91.40	88.06	98.19	93,5	93.7	83.44	91.22
Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	96.90	97.24	97.24	97.58	97.58	97.92	96.06	98.60	97,22	70.62	82.70	95.28
Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	5.00	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	3.57	6.38	7,18	4.81	4.97	5.22
Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	47.87	51.22	45,04	46.94	38.28	41.65
Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	50.10	52.10	54.10	56.10	58.10	60.10	37.59	45.14	45,44	43.45	37.38	46.00

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022					
Harapan Lama Sekolah	12.61	12.8	13.00	13.19	13.38	13.57	12.13	12.69	12,69	12.72	12.73	12.75
Rata-rata Lama Sekolah	8.24	8.43	8.63	8.82	9.01	9.2	8.05	8.35	8,35	8.42	8.53	8.54
Persentase situs dan cagar budaya yang lestari	6	24	41	59	76	100	-	-	33	52.38	100.00	100.00

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**. Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Lama Sekolah dengan target pada tahun 2022 adalah 13,57 tahun dan capaian 12,75 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah tidak mencapai target dikarenakan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 = 12,75 tahun artinya penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan menamatkan Pendidikan sampai SMA/SMK/MA Pendidikan 12 tahun dan kuliah selama 0,75 Tahun atau sekitar 9 Bulan. Pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sehingga keterbatasan Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah.
2. Rata-rata Lama Sekolah dengan target pada tahun 2022 adalah 9,02 tahun dan capaian 8,54 tahun. Rata-rata Lama Sekolah tidak mencapai target dikarenakan kurangnya keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa selain itu Angka target yang di targetkan terlalu tinggi, melihat angka capaian tiap tahunnya selalu terjadi peningkatan capaian, Namun demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah daerah telah berusaha secara maksimal dengan sumber daya yang ada untuk meningkatkan Rata - Rata Lama Sekolah dengan membantu masyarakat yang ingin melanjutkan Pendidikan ditingkat Menengah melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket C atau Setara SMA dan anak putus sekolah. Hal tersebut tergambar dari peningkatan warga belajar pendidikan kesetaraan pada tahun 2022



meningkat sebanyak 2.289 orang warga belajar apabila dibandingkan di tahun 2021 hanya sebanyak 1.811 orang warga belajar. Sedangkan untuk Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan ada peningkatan sebesar 2 satuan PKBM di tahun 2022 sehingga menjadi 1 SKB dan 12 PKBM yang tersebar di 4 kecamatan dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 1 SKB dan 10 PKBM dan tersebar di 3 Kecamatan.

3. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama sekolah sangat bergantung atas hasil perhitungan dari BPS

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Data Base masih sangat terbatas
2. Data Pokok Pendidikan belum akurat dan valid serta terintegrasi
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan
4. Belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa
5. Kurangnya Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten
6. Kurangnya fasilitas pendidikan sekolah tinggi dan Universitas di Kabupaten

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial dan kunjungan kesekolah/warga masyarakat.
2. Mendorong penduduk diatas usia 25 tahun yang rata-rata pendidikannya smp untuk melanjutkan kejenjang sma/paket c di skb/pkbn yang ada.
3. Mendorong masyarakat/ investor untuk berinvestasi di dunia pendidikan non formal melalui pkbn (pusat kegiatan belajar masyarakat).
4. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan program dari instansi lain.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan non formal.
6. Sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat
7. Mendorong penduduk diatas usia 25 tahun yang rata-rata pendidikannya smp untuk melanjutkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan.
8. Mendorong masyarakat / investor untuk berinvestasi di dunia pendidikan non formal melalui pkbn (pusat kegiatan belajar masyarakat).

9. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan program dari instansi lain.
10. Mendorong pkbm swasta untuk bekerja sama dengan sd/smp/sma terdekat dilingkungannya untuk melacak siswa yang putus sekolah dan menyelamatkan dengan melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan (paket a/b/c).



Gambar 3.1 Salah satu kegiatan meningkatkan kualitas pendidikan nonformal

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun masyarakat (sekolah swasta) dengan kualitas yang selalu dioptimalkan.
2. Peningkatan kompetensi, karir, dan kesejahteraan pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, tenaga administrasi, dan tendik lainnya) melalui diklat dan pelatihan.
3. Pendampingan peningkatan tata kelola satuan pendidikan/sekolah dan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C).
4. Penyediaan bantuan sosial pendidikan Kesetaraan bagi warga belajar dari keluarga Miskin/tidak mampu.
5. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder lain seperti Perangkat Daerah terkait, PGRI, dan lembaga pendidikan tinggi.

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja yang dapat di sandingkan dengan target/standar nasional adalah:

-	-	-

### 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi  
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i  
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i  
 CKi : Capaian keluaran i

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.6 Efisiensi Anggaran 2022

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase cagar budaya yang lestari	100	100	100	3.108.751.315	2.972.974.435	95,63	4,37
Total efisiensi anggaran								4,37

*Sumber: Data diolah*

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena:

1. Adanya kontribusi masyarakat, pengunjung cagar budaya dalam memelihara cagar budaya
2. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan cagar budaya

Tabel: 3.7 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lian		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pawai Nasi Adab</li> <li>- Festival Marunting Batu Aji</li> </ul>	Dinas Pariwisata	Fasilitasi kunjung wisatawan dan pelestarian budaya	Pelestarian budaya daerah.	Mendukung pencapaian target kinerja pelestarian dan cagar budaya yang lestari.

Sumber: Data diolah

### 3.5 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar **Rp 318.229.236.900,-** pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar **Rp 333.3380.130.000,-** Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar **Rp 317,035,574,537.00** atau sebesar **95.10%**. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel: 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional			
	Belanja Pegawai	212,937,724,609.00	200,889,578,802.00	94.34
	Belanja Barang/Jasa	40,678,661,036.00	37,883,050,322.00	93.13
	Belanja Hibah	25,352,297,667.00	25,131,873,103.00	99.13
2	Belanja Modal			
	Belanja Peralatan & Mesin	19,847,563,029.00	18,947,515,290.00	95.47
	Belanja Gedung & Bangunan	32,965,018,545.00	32,814,152,749.00	99.54
	Belanja Jalan dan Irigasi	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,598,865,114.00	1,369,404,271.00	85.65
<b>TOTAL</b>		<b>333,380,130,000.00</b>	<b>317,035,574,537.00</b>	<b>95.10</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	6		7
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>213,826,232,168</b>	<b>201,528,340,400</b>	<b>12,297,891,768.00</b>	<b>94.25</b>
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246,292,223	227,456,678.00	18,835,545.00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210,994,953,809	199,012,203,769.00	11,982,750,040.00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500,000,000	376,516,770.00	123,483,230.00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270,507,600	250,855,834.00	19,651,766.00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621,488,183	583,904,538.00	37,583,645.00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,957,360	35,884,450.00	72,910.00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763,921,693	684,401,536.00	79,520,157.00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393,111,300	357,116,825.00	35,994,475.00	
			-		
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>111,123,828,387.00</b>	<b>107,168,936,468.00</b>	<b>3,954,891,919.00</b>	<b>96.44</b>
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61,462,418,882.00	59,596,058,857.00	1,866,360,025.00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	36,378,471,268.00	35,065,753,111.00	1,312,718,157.00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10,591,629,165.00	10,141,992,030.00	449,637,135.00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,691,309,072.00	2,365,132,470.00	326,176,602.00	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>40,030,230.00</b>	<b>36,923,350.00</b>	<b>3,106,880.00</b>	<b>-</b>
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,030,230.00	19,999,950.00	30,280.00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20,000,000.00	16,923,400.00	3,076,600.00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	5,242,428,400.00	5,130,338,527.00	112,089,873.00	97.86
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,242,428,400.00	5,130,338,527.00	112,089,873.00	
2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	3,108,751,315.00	2,972,974,435.00	135,776,880.00	95.63
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,765,682,536.00	1,664,706,435.00	100,976,101.00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,343,068,779.00	1,308,268,000.00	34,800,779.00	
2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	38,859,500.00	37,074,900.00	1,784,600.00	95.41
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	38,859,500	37,074,900.00	1,784,600.00	
<b>J U M L A H</b>		<b>333,380,130,000</b>	<b>317,035,574,537.00</b>	<b>16,505,541,920</b>	<b>95.10</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 95.10% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Tinggi”.

Berdasarkan target dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, dapat disimpulkan bahwa pencapaian seluruh sasaran strategis terkategori “Efisien”. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mencapai sasaran di atas target yang direncanakan dengan memanfaatkan lebih sedikit anggaran dari yang direncanakan.

## BAB IV

### PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 83.49 % dengan peringkat kinerja **“Tinggi”**.
2. Capaian kinerja keuangan 95.10 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **317,035,574,537.00** sehingga masuk dalam peringkat kinerja tinggi.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Database masih sangat terbatas
2. Data Pokok Pendidikan belum akurat dan valid serta terintegrasi
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan
4. Belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin dikembangkan dalam penyelenggaraan pelayanan public.
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data pokok pendidik pada satuan Pendidikan
3. Sosialisasi dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan nonformal usia diatas 24 tahun
4. Bekerja sama dengan pemerintah desa, dalam rangka meningkatkan satuan Pendidikan nonformal sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pendidikan nonformal.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Pebruari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kotawaringin Barat,



**Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si**  
NIP. 19630219 199303 1 001

## LAMPIRAN-LAMPIRAN